

KERANGKA ACUAN

OGI Week "Penguatan dan Keberlanjutan OGP Local: Sebuah Praktik Baik Ko-Kreasi Pemerintah-CSO"

Rabu, 29 Mei (13.00-16.00)

Bappenas, Suropati, Jakarta

Pendahuluan

Open Government Partnership Local (OGP Local) adalah perluasan partisipasi Open Government Partnership (OGP) dilakukan sejak tahun 2020 untuk memperluas dan merangkul partisipasi Pemerintah Daerah di seluruh dunia untuk turut melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah di tingkat daerah.

Indonesia telah memiliki pemerintah daerah yang tergabung dalam OGP Local yaitu Brebes, Semarang, NTB, dan Banggai. Daerah tersebut tidak hanya melakukan OGP Local tetapi juga sudah memiliki komitmen nyata seperti Rencana Aksi Daerah OGP (RAD OGP), yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Ko-kreasi sebagai bentuk komitmen menjalankan keterbukaan pemerintah di tingkat daerah. Pada Prosesnya, terdapat tiga pemerintah daerah baru yang bergabung pada tahun 2024, Provinsi DIY, Provinsi Jawa Barat, dan Madiun.

Mendorong dan mempertahankan OGP Local sangat penting tidak hanya bagi Pemerintah Daerah, namun bagi Civil Society Organization (CSO) dan Masyarakat. Selain membuka ruang partisipasi publik dan transparansi publik terhadap kebijakan pemerintah, hal ini mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka.

INFID dan koalisi CSO untuk OGP mendampingi proses OGP Local pada awal proses pembentukannya. Dalam beberapa kunjungan Pemda ke Pusat, maupun sebaliknya ke daerah, telah terdapat proses dan praktik baik yang dilakukan oleh Pemerintah dan CSO lewat ko-kreasi di daerah. Hal ini tentunya dapat ditingkatkan dan didukung penuh oleh pemerintah pusat lewat berbagai cara agar dapat menginspirasi daerah lainnya, misalnya di NTB, Seknas FITRA di daerah berperan aktif dalam ko-kreasi dengan Pemda dalam mengimplementasikan RAD. Tidak hanya FITRA, tentu ada praktik baik lainnya, misal IDEA yang mengajukan diri sebagai CSO di OGP Local yang baru.

Pada rangkaian acara Open Government Week 2024, INFID bersama Seknas FITRA lewat dukungan IJRS akan menyelenggarakan diskusi yang mengangkat tema "Penguatan dan Keberlanjutan OGP Local: Sebuah Praktik Baik Ko-Kreasi Pemerintah-CSO" Acara ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesadaran publik, menjaring masukan dari stakeholder terkait dan masyarakat, mengawal pemerintah dalam setiap kebijakan publik, serta merancang ulang keberlanjutan OGP Local, dll.

Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menyampaikan praktik baik dan update pelaksanaan OGP Lokal.
2. Mendapatkan masukan untuk penguatan dan keberlanjutan pelaksanaan OGP Lokal.
3. Membangun komitmen pelaksanaan ko-kreasi CSO dan Pemda pada pelaksanaan OGP Lokal;
4. Membahas strategi keberlanjutan dan penguatan legal OGP Local melalui kerangka regulasi di tingkat pusat.

Hasil yang Diharapkan

Kegiatan ini bertujuan menghasilkan:

1. Adanya keluaran konkrit untuk keberlanjutan OGP Local;
2. Adanya tindak lanjut dari stakeholder terkait memperkuat OGP dan OGP Local melalui kerangka regulasi di tingkat pusat

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Rabu, 29 Mei 2024
- Waktu : Pukul 12.00 - 16.00
- Lokasi : BSM, Bappenas Suropati, Jakarta

Agenda Kegiatan

Waktu	Agenda
12.00 - 13.00	Registrasi
12.00 - 13.00	Makan Siang
13.00 - 13.15	Pembukaan oleh INFID <i>“Pentingnya OGP Local dan Keberlanjutannya”</i>
13.15 - 14.15	<ul style="list-style-type: none">• Solo Speak dari Perwakilan Pemda OGP Local (Pemda NTB) “Praktik Baik dan Kebijakan Pemda lewat Ko-Kreasi di OGP Local”• Solo Speak dari Perwakilan CSO di OGP Local (FITRA NTB/Diwakilkan Seknas FITRA) “Pelibatan CSO dalam mewujudkan partisipasi bermanfaat pada kebijakan publik”• Solo Speak dari KI Pusat/Daerah “Pentingnya keterbukaan dan pelibatan masyarakat luas dalam kebijakan pemerintah”• Solo Speak dari IJRS

	<p>“Penguatan kelembagaan OGP Local melalui kerangka regulasi di tingkat pusat”</p> <p>Moderator: Rinto Leonardo S (INFID)</p>
14.15 – 15.00	Tanggapan dan Diskusi (+Undangan Bappenas menanggapi pertanyaan)
15.00 – 15.00	<i>Wrap up</i> dan penutupan

Undangan dan Peserta

Peserta kegiatan :

A. Lembaga Pemerintah dan Mitra Pembangunan :

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas)
2. Komisi Informasi
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia (KemenPPPA)
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham)
5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
6. Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP)
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
8. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri)
9. Komnas Perempuan
10. Pemda di OGP Local

B. Organisasi Masyarakat Sipil:

1. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
2. Lembaga Bantuan Hukum APIK (LBH APIK)
3. Media Link
4. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
5. Indonesia Feminis
6. Jurnal Perempuan
7. Yayasan Kesehatan Perempuan
8. KAPAL Perempuan
9. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
10. PerEMPUan
11. Youth Coalition for Girls
12. Girl Up Indonesia
13. Kalyanamitra
14. Solidaritas Perempuan
15. IRI in Indonesia
16. Pamflet Generasi
17. Youth Power Indonesia
18. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

19. Indonesia Untuk Kemanusiaan (IKa)
20. PEREMPUAN AMAN
21. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK)
22. Feminis Themis
23. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)
24. Bina Desa
25. Never Okay Project
26. Migrant Care
27. IDEA
28. Bina Swadaya
29. Urban Poor Consortium (UPC)
30. Swara Nusa Institute
31. IRE Yogyakarta
32. Dll

Penutup

Mengingat ada keterbatasan peserta, untuk koordinasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Rinto Leonardo S (+62 82228399147/rinto@infid.org).